

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DAERAH UMUM ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Nurfitriana

Pitriutaba@yahoo.co.id

¹Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako
²Dosen Program Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako

Nurfitriana. Financial Management Analysis in Public Service Agency of Anuntaloko Hospital in Parigi Moutong (supervised by Muslimin and Vitayanti Fattah).

The problem statement of this study determined as: how is the trend of financial ratio of public services agency in public hospital of Anuntaloko in Parigi Moutong?. This study is presented as a qualitative descriptive by interviewing 9 competent informants in Anuntaloko Public Hospital of Parigi Moutong. The result shows that the trend of public service agency is decreasing but its financial performance has been very well. This can be seen from the management of the hospital's fixed assets that creates simple and easy patterns of financial management, direct financial management, and flexible budget with good percentage so the need of unplanned funding is always available. Therefore, better productivity and financial management performance can achieve well-performed public services.

Keywords: Public services agency, flexible, trend of financial management, financial management performance, and Anuntaloko Public Hospital of Parigi Moutong

Latar Belakang

Indonesia telah melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fisik lebih dari satu dekade. Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai dengan pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mendorong daerah dalam

memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien, dan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, kebijakan desentralisasi fisik dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan

aktivitas perekonomian daerah, yang pada gilirannya diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan perekonomian daerah secara bersama-sama akan menggerakkan roda perekonomian nasional (Kemenkeu RI, 2011).

Hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah proses yang dinamis dan dilaksanakan melalui berbagai bentuk penyempurnaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspirasi dari berbagai *stakeholders*. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional. Berbagai upaya penyempurnaan telah dilakukan, yaitu melalui penguatan *local taxing power*, percepat penyaluran transfer didaerah, upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pinjaman daerah, serta pengaturan mekanisme *reward* dan *punishment* untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Masyarakat menuntut pemerintah untuk mereformasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah

pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, khususnya reformasi pengelolaan keuangan daerah.

Pentingnya reformasi keuangan pemerintah sebagai fokus dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan strategis tertentu diwakili oleh luasnya skala persoalan yang harus diatasi antara lain:

Pertama, rendahnya efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat maraknya irasinalisasi pembiayaan kegiatan negara. Kondisi ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelolah keuangan publik sehingga muncul tuntutan untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja.

Kedua tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya yang dimiliki. Juga harus dilakukan analisis biaya-manfaat sehingga kegiatan yang dijalankan tidak saja sesuai dengan skala prioritas tetapi juga mendatangkan tingkat keuntungan atau manfaat tertentu bagi publik.

Persoalan ketiga yang menuntut dilakukannya reformasi manajemen keuangan pemerintah adalah terjadinya begitu banyak kebocoran dan penyimpangan, misalnya sebagai akibat adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terakhir adalah rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelolah anggaran public

sebagai mana di jumpai dalam manajemen sektor swasta. Jarang ditemukan ada manajemen yang professional dalam sektor publik bahkan ada desakan yang tegas untuk memasukkan sektor swasta ke dalam sektor publik di mana nilai-nilai akuntabilitas, profesionalisme dan transparansi menjadi kerangka kerja utamanya.

Perlu satu pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan organisasi, hal ini juga sekaligus mengubah paradigma lama bahwa instansi yang sukses dinilai atas keberhasilannya dalam menyerap anggaran dan bukan atas pencapaian tujuan yang pada akhirnya dapat memuaskan masyarakat banyak. Dengan kata lain suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walupun hasil atau dampak dari pelaksanaan program tersebut masih berada di bawah standar.

Kinerja keuangan menjadi salah satu pembeda antara rumah sakit yang belum dan sudah mengimplementasikan PPK-BLUD sehingga dapat dijadikan tolok ukur agar dapat memotivasi rumah sakit untuk mengimplementasikan PPK-BLUD. Pengukuran kinerja keuangan pada rumah sakit dalam mengimplementasikan PPK-BLUD dapat dilakukan dengan mengukur rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan yang digunakan mengukur kinerja keuangan rumah sakit dapat merujuk pada Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-34/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan.

RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong sebagai instansi yang padat karya, padat modal, dan padat ilmu serta teknologi memerlukan profesionalisme yang handal dalam pengelolaan bisnis moderen dengan misi sosial yang tetap menjadi prioritas utama. Melalui Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU), yang mulai di oprasikan sejak tahun 2014 diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan, profesionalisme, transparan dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip bisnis dalam produk layanan pengelolaan sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan BLU. Untuk itu perlu diharapkan penilai kinerja pengelolaan keuangan pada penerapan BLU dengan harapan akan mampu memberikan gambaran perbandingan pengelolaan keuangan pada RSUD Anuntaloko dalam rangka memajukan pelayanan publik melalui layanan kesehatan masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas.

Fenomena di atas sangat menarik untuk melakukan penulisan dan sesuai dengan konsentrasi keilmuan yang di dalami maka penulis mengambil judul penelitian "Analisis Pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada BLU di RSUD

Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong”.

Berdasarkan Uraian Ini Peneliti Tertarik Untuk Melakukan Penelitian “Analisis Pencapaian Kinerja Pengelolaan Pada Badan Layanan Umu Rumah Sakit Daerah Umum Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong” .

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Trend Rasio Keuangan Pada BLU di RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menggambarkan secara rinci mengenai variabel yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya (Sugiono 2000). Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong , waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2017.

Sugiono (2007:61), “populasi adalah wilayah generalisasi tertentu yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah Pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada BLU di RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong untuk kurun waktu Priode tahun 2014 – 2017.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang terdiri dari para pengelola keuangan BLUD di RSUD Anuntaloko Parigi Motong yakni sebanyak 8 orang, 1 orang selaku Sekretaris Dewan Pengawas BLUD dan 1 orang Direktur BLUD RSUD Anuntaloko.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan aturan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2004 :280).

Pengolahan data dalam penelitian ini diolah secara manual maupun dengan menggunakan komputer. Data yang sudah diolah selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik agar mudah untuk dibaca. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam membantu memecahkan permasalahan pada suatu penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Trand.

Menurut Kasmir (2012:82), analisis trend atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam presentase tertentu. Jika data yang digunakan lebih dari dua atau tiga periode, metode yang digunakan adalah angka indeks. Dengan menggunakan angka indeks akan dapat diketahui kecenderungan atau trend atau arah dari posisi keuangan, apakah meningkat, menurun, atau tetap.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini yaitu Kinerja pengelolaan keuangan yang diukur menggunakan Rasio-rasio yang mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 Tentang pedoman Penelitian Kinerja Badan Layanan

Umum Kesehatan. Rasio Keuangan yang digunakan untuk pengukuran kinerja meliputi:

a. Rasio Kas (*Cash Rasio*)

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kasa dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

b. Rasio Lancar (*Current Rasio*)

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

c. Priode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

$$\text{Priode Penagihan Piutang} = \frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ Hari}$$

d. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

$$\text{Perputaran Aset Tetap} = \frac{\text{Pendapatan Oprasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

e. Imbalan Atas Aset Tetap (*Return on fixed Asset*)

$$\text{Imbalan Atas Aset Tetap} = \frac{\frac{\text{Suplus atau Defisit}}{\text{sebelum Pos Keuntungan Atau Kerugian}}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

f. Imbalan Ekuitas (Retur non Equity)

$$\text{Imabalan Ekuitas} = \frac{\frac{\text{Suplus atau defisit}}{\text{Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}}{\frac{\text{Ekuitas-Surplus atau Defisit}}{\text{sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}} \times 100\%$$

g. Perputaran Persediaan (*Inventory Turunover*)

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Pendapatan BLU}} \times 1 \text{ Hari}$$

h. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Oprasional

$$\text{Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Oprasional} = \frac{\text{Pendapatan PNBP}}{\text{Biaya Oprasional}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Analisis Rasio Keuanagan BLU RSUD Anuntaloko

Tabel 4.2
Rasio Keuanagan BLU-RSUD Anuntaloko Tahun 2014-2017

INDIKATOR	SATUAN	2014	2015	2016	2017
RASIO KAS	%	380	5.89	5.01	2.6
RASIO LANCAR	%	632	328	217	144
PRIODE PENAGIHAN PIUTANG	Hari	33	13	8	133
PERPUTARAN ASET TETAP	%	5.83	129	207	3.15
IMBALAN ATAS ATAS ASET TETAP	%	1.29	6.27	4.09	1.47
IMBALAN EKUITAS PERPUTARAN PERSEDIAAN	Hari	2.39	9.99	7.4	1.53
RASIO PENDAPATAN PNBP TERHADAP BIAAYA OPRASIONAL	%	34	162	18	23
	%	7.7	3.68	1.3	160

Sumber: Bagian Keuangan RSUD Anuntaloko Parigi Moutong

Nilai Rasio Kas dan Rasio Lancar yang RSUD

Anuntaloko, karena dengan kondisi kas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pendanaan untuk pengadaan RUSD dan harus dipenuhi dengan cepat, Priode Perhitungan Piutang pada tahun 2017 sangat tinggi, diakibatkan pada tahun tersebut banyak Piutang Usaha yang harus di realisaikan, berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 Priode Perhitungan Piutang rendah dikarenakan Pendapatan Usaha yang stabil dan dapat direalisasikan tepat waktu. Dilihat dari Perputaran Aset Tetap pada tahun 2015 dan 2016 sangat tinggi dikarenakan Pendepatan Oprasional yang setabil. Imabalan Atas Asset Tetap pada tahun 2016 sangat

tinggi menguntungkan untuk BLU-

tinggi dikarenakan Aset Tetap yang stabil di banding 2014, 2015 dan 2017, peningkatan Imbalan Ekuitas juga dapat di lihat pada tahun 2015 dan 2016 yang menunjukan keseimbangan Ekuitas dalam selisi antara hak residul BLU atas asset dan kewajiban yang dimiliki, dibanding tahun 2014 dan 2017, Perputaran Persediaan dapat dilihat padatahun 2015 sangat tinggi, berbeda dengan tahun 2014,2016,2017 perputaran persediaan yang kurang sehingan lebih terealisasikan, sedangkan Rasio Pendapatan PNBp terhadap Biaya Oprasional sangat tinggi pencapaiannya pada atahun 2017 pendapatan PNBp yang meningkat.

2. Pencapaian Kinerja Keuanagn BLU-RSUD Anuntaloko

Tabel 4.3
 Penilaian Pencapaian Rasio Keuangan BLU-RSUD Anuntaloko 2014-2017

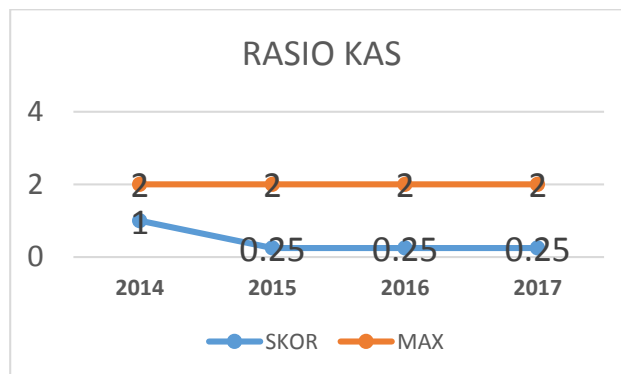
INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	MAKSIMAL
RASIO KAS	1	0.25	0.25	0.25	2
RASIO LANCAR	2.5	1.5	0.5	0.5	2.5
PRIODE PENAGIHAN PIUTANG	1.5	2	2	0	2
PERPUTARAN ASET TETAP	0.25	2	2	0.25	2
IMBALAN ATAS ATAS ASET TETAP	0.5	2	1.4	0.5	2
IMBALAN EQUITAS	0.8	2	1.8	0.6	2
PERPUTARAN PERSEDIAAN	2	0	1	1	2.5
RASIO PENDAPATAN PNBP TERHADAP BIAAYA OPRASIONAL	0.5	0	0	2.5	2

Berdasarkan penilaian pencapaian rasio diatas dapat diliat analsis trend dari indikator rasio kas, rasio lancar, priode perhitungan piutang, perputaran

aset tetap imbalan ekuitas, perputaran pesediaan, dan rasio pendapatan PNBp terhadap biaya oprasional diantaranya:

1. Kas

Perkembangan Trend Rasio Kas



Berdasarkan Gambar dapat dijelaskan bahwa Rasio kas pada tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami trend menurun dari standar skor rata-rata maksimal yaitu dari skor 1 menurun menjadi skor 0,25 dari standar maksimal skor 2, hal ini konsekwensi logis dari kebijakan Kas dan Setara

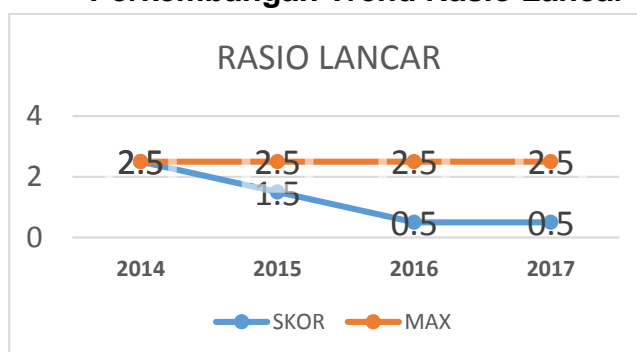
Kas mengalami perubahan kebijakan investasi setiap tahunnya, sedangkan kewajiban jangka pendek semakin meningkat sehingga mengalami peralihan dalam bentuk pemanfaatan aktiva lancar ke aktiva tetap dalam bentuk belanja antara lain, belanja peralatan dan mesin, alat kantor dan

rumah tangga, alat kedokteran, bangunan dan gedung dan sebagai mana terbaca pada lampiran neraca, dengan harapan kebijakan investasi ini berpengaruh terhadap aktifitas pelayanan pelanggan dan pencapaian

kinerja Rumah Sakit, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap naiknya penerimaan kas yang dapat meningkatkan kinerja pada tahun buku penerimaan yang akan datang.

2. Rasio Lancar

Perkembangan Trend Rasio Lancar

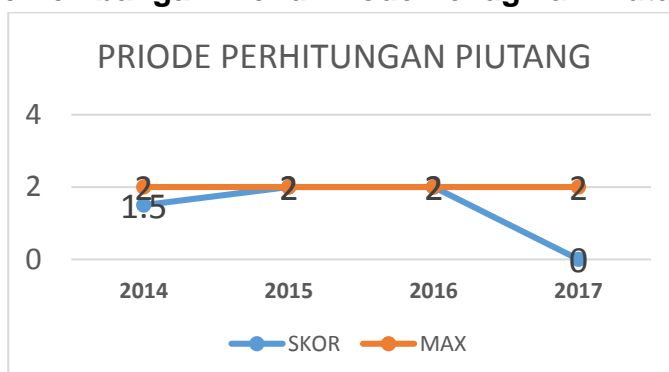


Berdasarkan Gambar, dapat dijelaskan bahwa Rasio Lancar pada tahun 2014 nilai skor 2, dimana mencapai skor maksimal, selanjutnya pada tahun 2015, 2016, 2017, Rasio Lancar terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 skor 1.5, tahun 2016 dan 2017 0.5. Hal ini terjadi karena adanya perubahan investasi terhadap peningkatan kewajiban jangka pendek diantaranya hutang barang dan jasa pada BLUD, hutang pada

pihak ketiga sebagai mana laporan keuangan neraca, terhadap aset lancar yang meliputi kas dan setara kas investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka yang mengalami perubahan investasi yang dapat mempengaruhi perputaran kinerja keuangan pada RSUD Anuntaloko yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan

3. Priode Penagihan Piutang

Perkembangan Trend Priode Penagihan Piutang

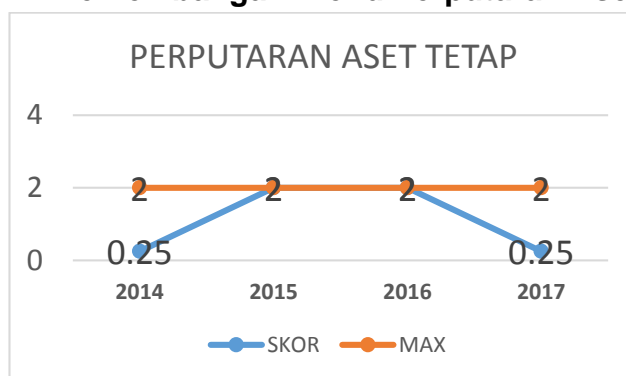


Berdasarkan Gambar trend dapat di jelaskan bahwa Priode Perhitungan Piutang pada tahun 2015 dan 2016 mencapai trend nilai skor maksimal 2. Sedangkan pada tahun 2014 skor 1.5 dan pada tahun 2017 priode panagihan piutang semakin menurun menjadi 0. Hal ini terjadi karena adanya priode perhitungan piutang melebihi jumlah hari priode penagihan pada tahun, 2014 mencapai 33 hari dan tahun 2017 mencapai 133 hari, sedangkan jumlah batas hari

dihitung berdasarkan penilaian kualitas piutang yang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh daerah dengan maksimal 30 sampai dengan 100 hari, hal ini menunjukan bahwa masa waktu piutang tertagih semakin lama, sehingga dapat memperlambat perputaran pendapatan usaha dan kinerja dalam pengelolaan keuangan RSUD Anuntaloko yang berdampak pada kinerja rumah sakit.

4. Perputaran Aset Tetap

Perkembangan Trend Perputaran Aset

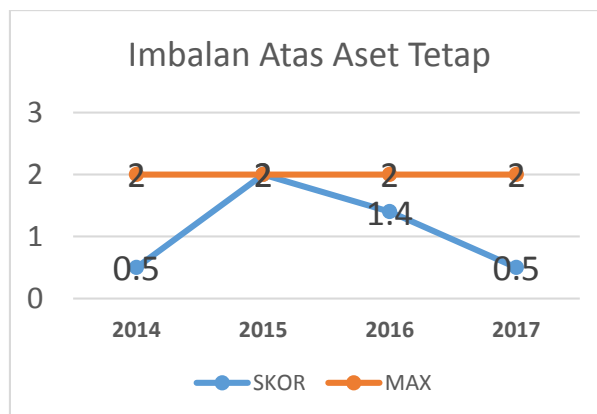


Berdasarkan Gambar, dapat di jelaskan bahwa Perputaran Aset Tetap pada tahun 2015 dan 2016 mencapai trend nilai skor maksimal 2, sedangkan pada tahun 2014 dan 2017 trend skor nilai turun menjadi 0.25, hal ini disebabkan perubahan peningkatan investasi pada aktiva tetap setiap tahunnya diatranya, peralatan dan mesin, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kedokteran, gedung

dan bangunan, sebagai mana terbaca pada lampiran neraca, berbeda pada aliran peningkatan pendapatan oprasional yang lebih kecil dari penigkatan investasi aktiva tetap, bersumber dari pendapatan jasa layanan per instansi dan lain-lain, pendapatan BLU sebagai mana terbaca pada lampiran neraca, sehingga dapat mempengaruhi kinerja RSUD Anuntaloko.

5. Imbalan Atas Aset Tetap

Perkembangan Trend Imabaln Aset Tetap

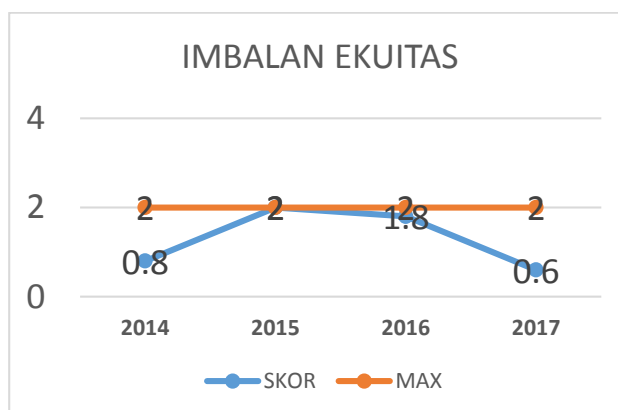


Berdasarkan 4 tahun pengamatan sesuai gambar trend, dapat di jelaskan bahwa Imbalan Atas Aset Tetap pada tahun 2015 sudah mencapai trend nilai skor maksimal 2, imbalan aset tetap pada tahun 2016 mencapai nilai skor 1.4 namun berbeda pada tahun 2014 dan 2017 yang mencapai trend nilai skor 0.5, hal ini disebabkan oleh investasi surplus atau defiiisit sebelum pos keuntungan atau kerugian yang di peroleh dari APBN dan biaya

penyusutan yang mengalami peralihan investasi setiap tahunnya sedankan aktiva tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk menjaga kualitas atas kinerja pelayanan maupun kinerja keuangan agar selalu dapat memberikan hasil yang maksimal dengan tujuan meningkatkan investasi RSUD Anuntaloko dalam meningkatkan kinerja pada tahun buku penerimaan yang akan datang.

6. Imbalan Ekuitas

Perkembangan Trend Imbalan Ekuitas



Berdasarkan Gambar, dapat di jelaskan bahwa Imbalan Ekuitas pada tahun 2015 mencapai nilai skor maksimal 2 dan imbalan ekuitas pada tahun 2016 nilai trand skor yaitu 1.8, sedangkan pada tahun 2014 dan 2017 nilai skor imablans ekuitas menajdi 0.8 di tahun 2014 dan 0.6 ditahun di tahu 2017, hal ini disebabkan oleh pergerakan ekuitas atas hak residual

BLU atas aset deangan seluruh kewajiban yang dimiliki mengalami perubahan kebijakan investasi setiap tahunnya yang menakibatkan jumlah surplus atau defisit sebelum pos keuntungan atau kerugian mengalami perubahan investasi, sehingga berpengaruh dalam kesediaan dana investasi program pergerakan ekuitas

7. Perputaran Persediaan

Perkembangan Trend Perputaran Persediaan



Berdasarkan Gmanbar, dapat di jelaskan bahwa Perputaran Persediaan pada tahun 2014 mencapai trend nilai skor maksimal 2 dan pada tahun 2016 dan 2017 nilai skor perputaran persediaan 1, sedangkan pada tahun 2015 penurunan skor yang tajam yaitu 0 diakibatkan jumlah hari yang telampau melebihi priode Perputaran Pesediaan yaitu 162 hari, hal ini disebabkan oleh priode perputaran persediaan melebihi jumlah hari perputaran pesediaan, pada tahun 2015 mencapai 162 hari, di mana jumlah batas hari dihitung berdasarkan skor rasio perputaran persediaan yang dilakukan dengan

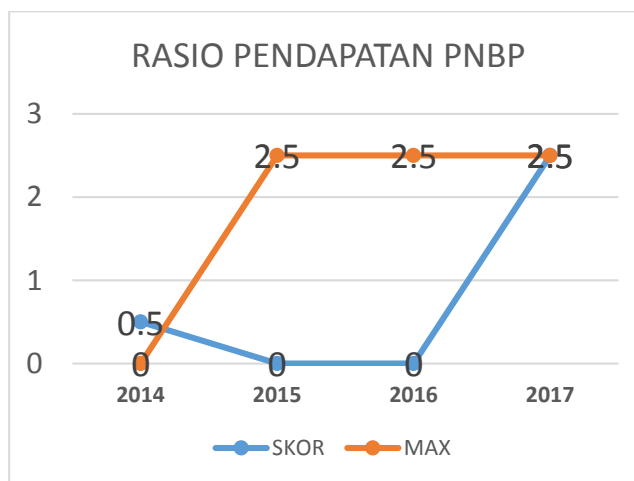
mempertimbangkan kemampuan perputaran persediann dengan melihat kemampuan perputaran persediaan maksimal 1 hari sampai dengan 60 hari. Hal ini menunjukan bahwa investasi imbalan BLU yang terdiri atas pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan pada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lainnya, sewa, jasa lembaga keuanagan dan lain-lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU termasuk pendapatan yang berasal dari APBN yang dapat mengalami perubahan investasi,

sehingga dapat memperlambat perputaran pendapatan usaha dan kinerja dalam pengelolaan keuangan

RSUD Anuntaloko yang berdampak pada kinerja rumah sakit.

8. Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Oprasional

Perkembangan Trend Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Oprasional



Berdasarkan Gambar 4.9, dapat di jelaskan bahwa Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Oprasional pada tahun 2017 mencapai trend nilai skor maksimal 2.5, namun mengalami penurunan nilai skor 0.5 pada tahun 2014, dan semakin menurun pada tahun 2015 dan 2016 nilai skor 0 dimana dimana hal ini disebabkan oleh meningkatnya investasi pada Biaya Oprasional yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan sumber dana yang berasal dari penerimaan anggran APBN dan asal dari APBN, belum dapat memaksimalakan Biaya Oprasional yang dibutuhkan RSUD yang dapat meningkatkan pencapaian kinerja pengelolaan RSUD Anuntaloko.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja pengelolaan keuangan BLU-RSUD Anuntaloko

pendapatan PNBPN BLU namun perubahan Investasi Pendapatan PNBPN sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang ber

dapat dilihat mengalami trend penurunan pengelolaan pencapaian dari tahun 2015, 2016, dan 2017, sementara di tahun 2014 rasio kas yang tinggi menandakan jumlah saldo kas yang banyak dan hal ini juga menandakan bahwa BLU-RSUD Anuntaloko pada tahun 2014 kurang

mengalokasikan kas untuk keperluan oprasional RSUD. Sementara untuk rasio lancar total maksimal ketersediaan dana lancar tahun 2014, begitupun tahun-tahun berikutnya hasilnya dapat dikatakan cukup baik namun dari segi ternd analisis dari tahun 2014-2017 rasio lancer mengalami penurunan sehingga dapat di peridiksikan pada tahun-tahun berikutnya akan mengalami penurunan. Priode penagihan piutang pada tahun 2014-2016 bisa dikatakan optimal dikarenakan dari tahu ketahun mengalami penurunan, artinya adalah waktu piutang tertagih semakin cepat dan hal tersebut menguatkan BLU-RSUD namun ditahun 2017 priode penagihan naik menjadi 133 hari hal ini menunjukan bahwa masa waktu piutang tertagih semakin lama, sehingga perputaran akan menjadi lambat.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan kondisi trend rasio keuanagan BLU di RSUD Anuntaloko dari tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami trend menurun, peningkatan trend pada tahun 2014 pada asset karena adanya kas sebesar 380% , pnurunan BLU-RSUD mengalami penurunan sejak taun 2015 dan semakin menurun hingga tahu 2017 karena adanya beban biaya oprasional yang tinggi.

mengatakan bahwa hutang lancar pada BLU-RSUD dapat dijamin oleh

2. Pencapaian kinerja keuangan BLU di RSUD Anuntaloko berdasarkan PER – 34 /PB/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan total skor pnilaian aspek pencapaian kinerja keuanagan BLU di RSUD Anuntaloko memiliki trend rata-rata semakin menurun di setiap tahunnya, di mana secara pencapaian kinerja keuangan belum mampu menjalankan kegiatan sebagai sumber dana RSUD Jadi dalam pelaksanaan BLU ini parameter keberhasilan telah berubah bukan lagi semata-mata keuntungan material, tetapi keberhasilan melayani menjadi unsur yang jauh lebih penting, dalam hal ini harus lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang feasible dengan menonjolkan produktifitas pencapaian kinerja baik keuangan maupun pelayanan.

SARAN

1. Pengelola BLU-RSUD dapat melakukan kontrol secara bertahap sehingga tidak terjadi keterlambatan penagihan - penagihan piutang yang bisah memicu keterlambatan dalam pelaksanaanya pencapaian kinerja.
2. RSUD Sebagai wadah pengelolaan dan pelaksana BLU dapat membuat kinerja lebih lanjut untuk mengola Aset yang di miliki, sehingga dapat

mengambil keputusan untuk mempercepat realisasi infrastruktur terutama pada RSUD Anuntaloko.

3. Diharapkan kepada peneliti-peneliti berikutnya yang memiliki ketertarikan melakukan riset serupa agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan memasukan variable-variable lain diluar variable pencapaian kinerja pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Prigi Moutong yang diamati dalam penelitian ini hal ini disebabkan karena hasil penelitian ini menunjukan kepada penurunan Trend disetiap tahunnya dalam pencapaian pengelolaan kinerja keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya tunjukan kepada pembimbing utama, pembimbing anggota, tim penyunting serta tim penguji atas bimbingan, arahan, serta masukan dalam setiap bagian dalam penulisan ini.

REFERENSI

Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Keenam. Rajawali Pers. Jakarta.

Kementerian keuangn Republik Indonesia (RI), 2011. Peningkatan Kualitas Pusat dan Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-34, 2014. tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan.

Sugiono,2000, Statistika untuk penelitian, Penerbit CV. Alfabeta, Edisi ke 4, Bandung.

Sugiono,2007, Statistika untuk penelitian, Penerbit CV. Alfabeta, Edisi ke 12, Bandung.

Moleong, L.J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revidi. Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung